

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi



**ANALISIS KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015-
2024**

Tim Peneliti:

Edy Suhartono, S.E., M.M
Azhari, SE, M.M
Anisa Dian Lestari
Afriska Alfiana Nillatul Laili

034 / LPPM-LIT / UB / XI / 2025

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Analisis Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024
2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Edy Suhartono, S.E., M.M
 - b. NIDN : 07 2607 7701
 - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - d. E-mail : edysshr66@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Ekonomi Pembangunan
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama Dosen : Azhari, S.E., M.M
 - b. NIDN/NIM : 07 1208 6903
 - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - d. E-mail : azharunigoro@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Ekonomi Pembangunan**Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama Mahasiswa : Anisa Dian Lestari
 - b. NIM : 23602011003
 - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - d. E-mail : Anisadianlestari1212@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Ekonomi Pembangunan**Anggota Peneliti 3**
 - a. Nama Mahasiswa : Afriska Alfiana Nillatul Laili
 - b. NIM : 23602011001
 - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - d. E-mail : afriskaalfiana@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Ekonomi Pembangunan
4. **Jangka Waktu Penelitian** : 6 Bulan
6. **Lokasi Penelitian** : Kabupaten Bojonegoro
7. **Dana Diusulkan** : Rp. 3.000.000

Bojonegoro, 10 Februari 2026

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN. 07 2108 8601

Edy Suhartono, S.E., M.M
NIDN. 07 2607 7701

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyusun proposal penelitian dengan judul “Analisis Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat Tahun 2015–2024” sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam program Hibah Internal Penelitian Universitas Bojonegoro.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami dinamika kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang selama satu dekade terakhir menunjukkan fluktuasi signifikan akibat perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan kebijakan pembangunan daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai tren, faktor penyebab, serta strategi pengentasan kemiskinan yang efektif berdasarkan data dan analisis komprehensif periode tahun 2015 hingga 2024.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, sekaligus menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Universitas Bojonegoro melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan program hibah internal ini. Tak lupa juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bojonegoro, 5 November 2025
Penulis,

Edy Suhartono, S.E., M.M

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
RINGKASAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	7
2.2. Penelitian Terdahulu	16
2.3. Kerangka Konsep Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	23
3.2. Lokasi Penelitian	23
3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	23
3.4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	24
3.5. Analisis Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	25
4.2. Pembahasan	31
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	33
5.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow.....	25
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman	26
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Regresi Terbaik Fixed Effect Model (FEM).....	27
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	28
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	29
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien determinan (R ²).....	29
Tabel 4.7 Hasil Uji T.....	30
Tabel 4.8 Uji F	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian	21
---	----

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat dan dinamika kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2015 hingga 2024. Kemiskinan tetap menjadi isu pembangunan krusial di NTB, sehingga pemahaman mendalam mengenai tren dan faktor-faktor yang memengaruhinya sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan memanfaatkan analisis data sekunder. Sumber data utama berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data terkait lainnya yang mencakup indikator kemiskinan, sosial, dan ekonomi regional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris dan komprehensif tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat NTB selama satu dekade terakhir. Selain itu, temuan ini diharapkan menjadi dasar ilmiah dalam perumusan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, adaptif, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik spesifik wilayah NTB, guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Kata Kunci: Kemiskinan, Dinamika Kemiskinan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Determinan, Kebijakan Pembangunan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang mendasar dan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi tidak hanya mencerminkan rendahnya taraf hidup masyarakat, tetapi juga menjadi penghambat utama dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah maupun pusat dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan (Andina, & Wahyudi, 2024).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi yang masih menghadapi tantangan signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di NTB mengalami fluktuasi selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu tahun 2015 hingga 2024 (Hindayani, et al, 2024). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah NTB, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Perilaku tren kemiskinan tersebut menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang berkontribusi dalam pengendalian dan penurunan angka kemiskinan (Riyanto, 2025).

Terdapat beberapa komponen utama yang menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Belanja Daerah. PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh secara mandiri dari berbagai sektor, yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola pendapatannya (Talangamin, et al, 2018). DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendanai program-program prioritas sesuai kebutuhan lokal. Sementara itu, Belanja Daerah mencerminkan realisasi penggunaan anggaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara optimal (Malau, et al, 2023).

Penelitian mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah terhadap tingkat kemiskinan di NTB sangat penting dilakukan sebagai salah satu upaya evaluasi kebijakan fiskal daerah. Dengan memahami keterkaitan antara alokasi dan penggunaan keuangan daerah terhadap indikator kemiskinan, pemerintah dapat merumuskan strategi kebijakan yang lebih

spesifik dan tepat sasaran dalam mengatasi kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Awaludin, & Wibowo, 2023).

Tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2015 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan meskipun masih berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di NTB pada tahun 2015 berada di kisaran 14 persen, dan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2024, persentase kemiskinan di NTB tercatat sebesar 11,91 persen, mengalami penurunan sekitar 1 persen dari 12,91 persen pada Maret 2024 dan turun 1,94 persen jika dibandingkan dengan Maret 2023. Penurunan ini juga tercermin dalam jumlah penduduk miskin yang berkurang menjadi sekitar 658,6 ribu jiwa pada Desember 2024 dari 751,23 ribu jiwa pada Maret 2023 (Hindayani, et al, 2024). Meskipun demikian, angka kemiskinan NTB masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang pada periode yang sama berada di bawah 10 persen, yang mengindikasikan tantangan sosial dan pembangunan yang masih harus diatasi di daerah ini. Perbedaan persentase kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di NTB juga cukup signifikan, dengan wilayah perdesaan menunjukkan angka kemiskinan yang sedikit lebih tinggi (Primadianti, & Sugiyanto, 2020).

Faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2015-2024 meliputi aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah, ketimpangan distribusi sumber daya, serta rendahnya akses dan kualitas pendidikan menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan di wilayah ini. Selain itu, faktor pengangguran yang tinggi dan rendahnya tingkat investasi di sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga berkontribusi signifikan dalam memperburuk kondisi kemiskinan di NTB (Alim, & Harsono, 2025).

Faktor geografis menjadi salah satu penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Wilayah NTB terdiri dari banyak pulau dengan topografi yang beragam dan sulit, serta sering mengalami kondisi alam yang tidak mendukung seperti kekeringan dan rawan pangan. Kondisi geografis ini menyebabkan keterisolasian yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan sulitnya mobilitas penduduk serta distribusi barang dalam wilayah yang tersebar menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Hindayani, et al, 2024).

Faktor pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja merupakan tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Data Badan Pusat Statistik

(BPS) NTB menunjukkan bahwa pada Agustus 2024, jumlah pengangguran di NTB mencapai sekitar 87 ribu orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 2,73 persen, meskipun angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (Budiman, et al, 2024). Tingkat pengangguran di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Rendahnya kesempatan kerja yang berkualitas dan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri memperburuk kondisi ini. Pemerintah daerah melalui program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan penyelenggaraan job fair berupaya mengurangi pengangguran, khususnya di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang selama ini memiliki angka pengangguran tertinggi (Saputra, et al, 2024).

Kondisi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2025 menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang cukup kompleks. Meskipun sektor industri pengolahan dan ekspor di NTB sempat menunjukkan pertumbuhan positif, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada Triwulan I dan II 2025 mengalami kontraksi, terutama disebabkan oleh melambatnya sektor pertambangan yang merupakan kontributor utama ekonomi daerah (Sianipar, et al, 2025). Hal ini berdampak pada tingkat pengangguran dan ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. Selain itu, ketimpangan ekonomi di NTB juga menunjukkan tren meningkat, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat di wilayah pedesaan cenderung lebih mengalami kesulitan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur, yang memperberat kondisi kemiskinan (Ibrahim, 2025).

Kontraksi sektor pertambangan, khususnya batubara, di daerah seperti NTB berdampak signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Menurut studi dan berbagai laporan, penurunan aktivitas pertambangan mengakibatkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta berdampak langsung pada penurunan peluang kerja dan penghasilan warga yang bergantung pada sektor ini (Lalenda, & Santoso, 2025) Warga yang sebelumnya mengandalkan aktivitas pertambangan sebagai sumber utama penghasilan mengalami kesulitan ekonomi akibat menurunnya kegiatan produksi dan pendapatan dari kegiatan tersebut. Dampak ini juga memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, khususnya masyarakat yang selama ini mengandalkan pertambangan sebagai sumber pendapatan utama, sehingga meningkatkan kerentanan kemiskinan di wilayah tersebut (Octaviani, & Supriadi, 2024).

Perkembangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dari tahun 2015 hingga 2024 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan di NTB sekitar 14 persen dan menurun menjadi 11,91 persen pada September 2024, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 658,6 ribu jiwa. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor

seperti program bantuan sosial, pengendalian inflasi, dan peningkatan akses layanan dasar. Meskipun begitu, kemiskinan di daerah perkotaan mengalami fluktuasi dan masih menjadi perhatian, sedangkan di perdesaan cenderung menurun lebih stabil. Situasi ini menggambarkan bahwa penurunan kemiskinan di NTB berjalan positif namun memerlukan perhatian khusus terhadap wilayah perkotaan untuk mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi (Wardini, 2024).

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mencakup variabel-variabel utama yang merefleksikan kondisi keuangan daerah dan tingkat kemiskinan masyarakat. Untuk variabel dependen, yaitu kemiskinan, indikator yang digunakan adalah persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang meliputi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan per kapita per bulan. Data ini penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan di NTB (Kusuma, et al, 2020). Sedangkan untuk variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah, indikator yang dipilih adalah nilai realisasi dari masing-masing sumber pendanaan tersebut. Nilai-nilai ini mencerminkan kemampuan fiskal daerah dan besarnya dukungan pemerintah pusat yang dialokasikan untuk pembangunan dan program pengentasan kemiskinan (Ferdiansyah, et al, 2018)

Kondisi ekonomi daerah dan tingkat kemiskinan masyarakat merupakan indikator utama dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memahami hubungan antara pengelolaan dana daerah dan perubahan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2015-2024. Kondisi ekonomi daerah diukur melalui variabel seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Belanja Daerah yang menunjukkan kapasitas fiskal dan prioritas penggunaan anggaran daerah dalam pembangunan ekonomi dan sosial (Pratama, et al, 2025).

Sedangkan tingkat kemiskinan diukur menggunakan persentase penduduk miskin yang didefinisikan berdasarkan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan dasar pangan dan non-pangan. Dengan menggunakan indikator-indikator ini, penelitian dapat mengkaji secara komprehensif bagaimana alokasi dan pemanfaatan dana daerah mempengaruhi pengentasan kemiskinan, sekaligus memberikan gambaran dinamika sosial-ekonomi masyarakat di NTB. Hal ini penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang efektif untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut (Yasin, 2021).

Indikator terkait ekonomi daerah dan tingkat kemiskinan masyarakat dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Indikator ekonomi daerah direpresentasikan melalui

realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah yang mencerminkan kapasitas fiskal serta prioritas pengalokasian dana pemerintah daerah untuk pembangunan dan program sosial. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita yang menjadi indikator kesejahteraan umum. Sementara, indikator tingkat kemiskinan masyarakat diukur melalui persentase penduduk miskin yang dihitung berdasarkan garis kemiskinan yang mengakomodasi kebutuhan makanan dan non-makanan (Mulia, & Putri, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks serta signifikan. Meskipun terdapat tren penurunan tingkat kemiskinan antara tahun 2015 hingga 2024, persentase kemiskinan di NTB masih berada di atas rata-rata nasional. Variabel-variabel keuangan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pengentasan kemiskinan, namun pengaruhnya harus dianalisis secara lebih mendalam.

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di NTB Dengan Menggunakan Distributed Lag Model. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengevaluasi peran pengelolaan dana daerah dalam mengubah tingkat kemiskinan di NTB, dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan (Nurdin, & Dini, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemiskinan?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap kemiskinan?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kemiskinan.
2. Untuk mengetahui Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap kemiskinan.
3. Untuk mengetahui Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bidang Akademisi

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa referensi empiris yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan studi lanjutan mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam pengentasan kemiskinan, serta memperkaya literatur akademik di bidang ekonomi daerah dan pembangunan sosial.

2. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai hubungan antara kebijakan fiskal daerah dengan kemiskinan, serta meningkatkan kemampuan analisis data dan pemahaman metodologi penelitian di bidang ekonomi pembangunan.

3. Pemberi Dana (Hibah)

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan dana daerah yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan di NTB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori penting dalam suatu penelitian karena memberikan kerangka kerja yang kokoh dan panduan untuk memahami, merencanakan, dan menjalankan penelitian dengan lebih sistematis dan terstruktur (Handoko, et al, 2024). Teori membantu peneliti untuk merumuskan hipotesis, merancang metode penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil. Dengan memiliki landasan teori yang kuat, penelitian dapat menjadi lebih fokus, relevan, dan dapat diandalkan dalam menghasilkan temuan yang bermakna. Selain itu, teori juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan hasil penelitian mereka dengan penelitian sebelumnya dan mengintegrasikan pengetahuan yang ada ke dalam pemahaman yang lebih luas tentang subjek yang diteliti (Pugu, et al. 2024). Maka landasan teori adalah pondasi yang esensial dalam membangun pengetahuan yang lebih baik dan memajukan pemahaman dalam berbagai bidang penelitian.

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi di mana individu atau kelompok masyarakat mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, yang meliputi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan (Andina, & Wahyudi, 2024). Secara ekonomis, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan dasar tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial. Lebih dari sekadar kekurangan materi, kemiskinan juga memiliki dimensi sosial, yaitu ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi secara layak dalam kehidupan sosial dan ekonomi akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan (Putri, & Mukramin, 2023).

Pengukuran kemiskinan secara umum menggunakan garis kemiskinan, yaitu batas minimum pengeluaran atau pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup tersebut (Dama, 2016). Di Indonesia, garis kemiskinan biasanya ditetapkan berdasarkan dua komponen utama Garis Kemiskinan Makanan (GKM), yaitu pengeluaran minimum yang setara dengan kebutuhan energi minimal 2100 kilo kalori per kapita per hari untuk makanan pokok, dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), yaitu kebutuhan minimum untuk aspek non-pangan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Seseorang atau rumah tangga dikatakan miskin apabila pengeluaran rata-rata per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan ini (Marlina, et al, 2022). Pengukuran ini juga menggambarkan tingkat

kesejahteraan yang rendah dan menandakan terbatasnya akses masyarakat terhadap sarana penting untuk meningkatkan kualitas hidup.

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953) menjelaskan bahwa kemiskinan menjadi suatu siklus yang sulit diputus karena berbagai faktor saling berhubungan secara melingkar. Dalam teori ini, kemiskinan menyebabkan rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan modal dan sumber daya (Andina, & Wahyudi, 2024). Rendahnya produktivitas ini menurunkan pendapatan masyarakat sehingga kemampuan untuk menabung dan berinvestasi juga rendah. Akibatnya, modal tetap sedikit, pasar menjadi tidak sempurna, dan keterbelakangan ekonomi terus berlanjut secara berulang tanpa ujung dan pangkal yang jelas.

Dalam kajian teori kemiskinan, terdapat perbedaan pendekatan antara teori struktural dan teori individual. Teori struktural memandang kemiskinan sebagai akibat dari ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang melekat dalam sistem ekonomi dan sosial, seperti distribusi sumber daya yang tidak merata, diskriminasi, dan struktur pasar yang timpang (Hababil, et al, 2024). Sedangkan teori individual memfokuskan pada faktor-faktor pribadi seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, atau kurangnya motivasi individu sebagai penyebab kemiskinan (Pribadi, & Marsono, 2023). Pendekatan struktural lebih menekankan pada perubahan sistem sosial dan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan, sedangkan pendekatan individual lebih menekankan pada pengembangan kapasitas individu.

Pendekatan multidimensional poverty melihat kemiskinan tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi sebagai akumulasi keterbatasan dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, akses air bersih, perumahan, dan partisipasi sosial (Hadi, et al, 2024). Pendekatan ini mengakui bahwa kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang memerlukan intervensi holistik, bukan hanya peningkatan pendapatan semata. Pendekatan multidimensional ini banyak digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih nyata tentang kemiskinan serta memperkaya dasar kebijakan pengentasan kemiskinan.

Faktor penyebab dan determinan kemiskinan sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek sosial dan ekonomi (Diyanayati, & Padmiati, 2017). Salah satu faktor utama adalah aspek demografis, khususnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Rendahnya pendidikan menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan cukup, sehingga keterbatasan keterampilan dan pengetahuan menjadi hambatan untuk keluar dari kemiskinan (Mulyadi, 2017). Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan juga menjadi penyebab penting kemiskinan, di mana sebagian besar pendapatan terkonsentrasi pada

kelompok tertentu sementara kelompok miskin mendapat bagian yang sangat kecil, sehingga kesenjangan sosial-ekonomi semakin melebar.

Pembangunan ekonomi yang tidak merata juga memperparah kemiskinan, terutama di daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Barat, di mana akses terhadap infrastruktur, layanan publik, dan kesempatan ekonomi masih sangat terbatas (Primadianti, & Sugiyanto, 2020). Ketidakmerataan ini menghambat kesempatan penduduk miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya pengurangan kemiskinan harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut agar kebijakan yang dibuat efektif dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok miskin.

Variabel ekonomi daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah memegang peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah itu sendiri, sedangkan DAU dan DAK merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menutupi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Verawaty, et al, 2020). Belanja Daerah mencakup pengeluaran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan berbagai program sosial ekonomi.

Dalam identifikasi pengentasan kemiskinan, variabel-variabel ini memiliki pengaruh signifikan karena alokasi dan pengelolaan dana tersebut menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Secara teoritis, peningkatan alokasi dana dan efektivitas pemanfaatan anggaran daerah dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan (Huda, et al, 2024). Dengan demikian, intervensi fiskal daerah melalui PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah menjadi mekanisme strategis dalam memutus siklus kemiskinan dan mendorong pembangunan inklusif di wilayah yang masih tertinggal seperti Nusa Tenggara Barat.

Penurunan kemiskinan ini memberikan gambaran bahwa kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di NTB mulai menunjukkan hasil positif, meski masih terdapat tantangan dalam mengatasi ketimpangan wilayah (Akib, et al, 2025). Sehingga dapat menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya bersumber dari faktor individual, namun juga terkait dengan struktur sosial dan ekonomi yang ada.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam struktur keuangan daerah yang didefinisikan sebagai penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ramadhan, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang mencakup hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut sebagai manifestasi dari asas desentralisasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa PAD merupakan akumulasi dari pos-pos penerimaan pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, serta hasil pengelolaan sumber daya alam yang menjadi hak daerah. Oleh karena itu, PAD tidak hanya mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah, tetapi juga merupakan indikator tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Panggabean, et al, 2025).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup beberapa komponen utama yang menjadi sumber keuangan bagi pemerintah daerah dalam mendanai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik (Handraini, et al, 2024). Komponen pertama adalah pajak daerah yang meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, yang merupakan pungutan wajib tanpa imbalan langsung yang dibebankan kepada masyarakat di wilayah daerah. Pajak ini mencerminkan kemampuan fiskal daerah untuk mendukung kemandirian dan otonomi fiskal. Selanjutnya, terdapat retribusi daerah yang terdiri atas pungutan atas jasa umum, jasa usaha, dan perizinan yang sifatnya merupakan balas jasa dari pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau pelaku usaha.

Selain pajak dan retribusi, komponen lain dari PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yakni pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset daerah yang telah dialokasikan secara khusus untuk mendanai kebutuhan daerah. PAD juga berasal dari lain-lain pendapatan yang diperoleh secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan pengelolaannya, pendapatan bunga, jasa giro, serta keuntungan selisih nilai tukar dan pendapatan lain yang diakui secara sah (Murti, & Trisnawati, 2021). Keseluruhan komponen

tersebut membentuk struktur PAD yang menjadi fondasi keuangan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, memungkinkan daerah membiayai pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur secara mandiri (Kamala, et al, 2025). PAD juga memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat, sehingga daerah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Risdiyanto, et al, 2023). Optimalisasi PAD menjadi kunci penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

Secara umum PAD digunakan sebagai sumber utama pembiayaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah, termasuk peningkatan fasilitas infrastruktur dan program-program sosial yang langsung menyentuh masyarakat miskin (Handraini, et al, 2024). Peningkatan PAD meningkatkan kapasitas fiskal daerah, memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan lebih banyak dana untuk program pengentasan kemiskinan, sehingga memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan secara langsung (Manek, & Badrudin, 2016). Pengelolaan PAD yang efektif dan optimal menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Konsep PAD erat kaitannya dengan teori otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara mandiri dengan mengelola sumber daya sendiri, termasuk keuangannya (Christia, 2019). Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pengelolaan PAD yang efektif tidak hanya meningkatkan kapasitas fiskal daerah tetapi juga memungkinkan alokasi dana yang tepat sasaran untuk pembiayaan program-program pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk upaya pengentasan kemiskinan (Hafizd, et al, 2024). Dengan demikian, PAD berfungsi sebagai instrumen penting yang mengintegrasikan prinsip desentralisasi fiskal dan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan daerah, kemandirian fiskal, dan pengentasan kemiskinan (Manek, & Badrudin, 2016). Studi-studi menyatakan bahwa peningkatan PAD berkontribusi besar terhadap alokasi belanja daerah, terutama untuk belanja modal yang mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Rahman, & Sumarni, 2024).

Selain itu, PAD juga memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, yang memungkinkan pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengelola anggaran pembangunan dan program pengentasan kemiskinan secara efektif.

Dalam kerangka teoritis, hubungan kausal antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui mekanisme peningkatan belanja daerah yang didukung oleh kenaikan PAD (Fitriyanti, & Handayani, 2021). Peningkatan PAD memberikan pemerintah daerah kapasitas fiskal yang lebih besar untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang esensial, seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial, yang secara langsung memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin (Huda, et al, 2024). Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa peningkatan PAD berdampak positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan melalui efektivitas alokasi belanja daerah yang lebih optimal.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen utama transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah, yang didefinisikan sebagai dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah secara umum tanpa syarat penggunaan yang spesifik (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) (Yaqin, & Herwanti, 2018). DAU diperoleh dari pemerintah pusat dan dialokasikan berdasarkan formula yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan fiskal daerah, potensi pendapatan, dan luas wilayah, dengan tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah.

DAU berperan sebagai instrumen perimbangan fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan, termasuk sektor-sektor yang langsung berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar (Simanjuntak, et al, 2025). Alokasi DAU yang signifikan sekitar 50-60% dari total transfer pusat ke daerah memungkinkan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal mereka, sehingga dapat mengalokasikan anggaran untuk program-program sosial yang efektif (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022) (Suryani, 2024). Di NTB, DAU sering digunakan untuk mendukung inisiatif seperti pembangunan jalan dan fasilitas kesehatan, yang meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik.

Landasan teori DAU dapat dikaitkan dengan teori perimbangan fiskal (fiscal equalization) yang dikembangkan oleh Richard Musgrave (1959), yang menekankan pentingnya transfer antar daerah untuk mencapai keadilan fiskal dan mendorong pertumbuhan

ekonomi yang merata (Agastha, & Rahman, 2025). Teori ini menjelaskan bahwa DAU sebagai mekanisme redistribusi sumber daya dapat mengatasi ketimpangan antara daerah kaya dan miskin, sehingga daerah seperti NTB dapat memperoleh modal tambahan untuk investasi produktif.

Teori trickle-down effect dari David Ricardo (1817) menyiratkan bahwa peningkatan pendapatan daerah melalui DAU dapat "menetes" ke lapisan masyarakat bawah melalui belanja publik, meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi kemiskinan. Dalam perspektif teori pembangunan ekonomi Walt Rostow (1960), DAU mendukung transisi daerah dari tahap tradisional ke modern dengan menyediakan dana untuk infrastruktur dan layanan sosial, yang esensial untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu komponen dari transfer fiskal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Sinaga, et al, 2020). DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah guna mendanai kegiatan tertentu yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan utama dari pemberian DAK adalah untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional (Rais, et al, 2025). Berdasarkan teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972), pendelegasian kewenangan fiskal kepada daerah melalui mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks ini, DAK menjadi instrumen penting untuk memastikan agar kebijakan pembangunan di tingkat daerah tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional (Suhardi, & Panjaitan, 2025).

DAK dibedakan menjadi dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik (Andini, & Pribadi, 2022). DAK Fisik digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, sanitasi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan, sedangkan DAK Nonfisik ditujukan untuk membiayai kegiatan noninfrastruktur seperti tunjangan profesi guru, dana bantuan operasional sekolah, serta layanan kesehatan dasar (Kementerian Keuangan, 2024). Kedua jenis DAK tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik

dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui alokasi DAK yang tepat sasaran, diharapkan dapat terjadi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi yang pada akhirnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Hubungan antara DAK dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui teori pengeluaran publik (Musgrave, 1959), yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat berperan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (Abdi, et al, 2025). Dalam konteks ini, DAK sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperbaiki distribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Selain itu, teori pertumbuhan endogen (Romer, 1986) juga menjelaskan bahwa investasi pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui mekanisme seperti DAK dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka Panjang (Bado, et al, 2017).

Secara teoritis maupun empiris, Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggap sebagai salah satu variabel penting dalam mendorong penurunan kemiskinan di daerah (Triyulianto, & Nurvita, 2024). DAK yang dialokasikan secara efektif dan efisien mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah (Halawa, et al, 2025). Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat, peningkatan alokasi dan optimalisasi penggunaan DAK diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menurunkan tingkat kemiskinan selama periode 2015-2024.

5. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Karlinda, et al, 2015). Belanja daerah mencerminkan bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerahnya (Maulina, et al, 2021). Melalui belanja daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Tujuan utama dari belanja daerah adalah untuk menyediakan layanan publik yang merata, mendorong aktivitas ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan (Aryansah, et al, 2024). Belanja daerah memiliki peran penting dalam menstimulasi

perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat dan penciptaan lapangan kerja. Peningkatan alokasi belanja daerah diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan (Permana, et al, 2024). Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, belanja daerah juga mampu berfungsi sebagai alat pemerataan pembangunan antarwilayah di dalam suatu provinsi.

Berdasarkan jenisnya, belanja daerah dapat dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi mencakup pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, barang dan jasa, serta bantuan sosial, sementara belanja modal diarahkan untuk membangun aset atau infrastruktur yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang (Afni Wahyuni, 2024). Belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, pendidikan, dan kesehatan akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Semakin baik infrastruktur dan pelayanan publik yang tersedia, semakin besar peluang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dan keluar dari kondisi kemiskinan.

Belanja daerah memiliki hubungan erat dengan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Peningkatan belanja daerah, terutama pada sektor-sektor produktif dan pelayanan publik, dapat mempercepat penurunan kemiskinan (Putri, & Yefriza, 2025). Belanja di bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, belanja kesehatan akan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dan belanja infrastruktur akan membuka akses ekonomi yang lebih luas. Sebaliknya, belanja daerah yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran dapat menyebabkan ketimpangan dan memperlambat proses pengentasan kemiskinan (Bandiyono, 2018). Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan kesempatan ekonomi yang lebih luas (Imsar, & Zaman, 2024). Besarnya alokasi belanja daerah yang diarahkan secara tepat dan dikelola secara efisien akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Yaqin, & Herwanti, 2018). Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat, peningkatan belanja daerah yang difokuskan pada sektor-sektor strategis diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan selama periode 2015–2024.

2.2 Penelitian Terdahulu

Manfaat penelitian terdahulu dalam penelitian adalah sebagai landasan atau dasar yang membantu peneliti memahami konteks dan literatur yang relevan terkait dengan topik penelitian yang sedang mereka teliti. Penelitian terdahulu memberikan wawasan tentang temuan, teori, dan metodologi yang telah ada sebelumnya, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih baik, merancang pendekatan penelitian yang lebih efektif, dan memperluas pemahaman tentang topik tertentu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1.	Rizki Ramadhani (2024)	Kuantitatif	Variabel (X): PAD, DAK, DBH Variabel (Y1): Belanja Daerah Variabel (Y2): Kemiskinan	Hasil Penelitian menunjukkan Belanja daerah mampu memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kemiskinan, Belanja daerah belum mampu memediasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan, Hipotesis ketiga menunjukkan hasil bahwa belanja daerah mampu memediasi pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap tingkat kemiskinan daerah, dan Variabel intervening dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah secara signifikan negative mampu menurunkan tingkat kemiskinan.
2.	Tasya A. Makawaeh, Een N.Walewangko,	Kuantitatif	Variabel (X): PAD, Belanja	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara

	Jacline I. Sumual (2023)		Modal dan DAU Variabel (Y1): Pertumbuhan Ekonomi	<p>parsial: 1). Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 2). Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 3). Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 4). Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.</p>
3.	Firda Monica, Chairul Sa'roni (2022)	Kuantitatif	Variabel (X): PAD, DBH, DAU, dan DAK Variabel (Y1): Belanja Daerah Variabel (Y2): Pertumbuhan Ekonomi	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. PAD dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan, DBH, DAU, dan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap</p>

				Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Daerah mampu menjadi mendiator antara PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4.	Hartika Rhamedia1, Hamdy Hady, Lusiana Lusiana (2022)	Kuantitatif	Variabel (X): PAD dan DAU, Variabel (Y1): Belanja Daerah Variabel (Y2): Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) pada Provinsi Sumatera Barat. Dana Alokasi Umum (DAU), berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) pada Provinsi Sumatera. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) pada Provinsi Sumatera Barat. Dana Alokasi Umum (DAU), berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) pada Provinsi Sumatera Barat. Belanja Daerah (BD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) pada Provinsi

				Sumatera Barat. Pendapatan Asli Daerah (PAD), berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) melalui Belanja Daerah (BD) sebagai Variabel Intervening pada Provinsi Sumatera. Dana Alokasi Umum (DAU), tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) melalui Belanja Daerah (BD) sebagai Variabel Intervening pada Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017-2021.
5.	Riza Amami, Kiki Asmara (2022)	Kuantitatif	Variabel (X): PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal Variabel (Y): Kemiskinan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan; dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan; dana alokasi khusus tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan; dan belanja modal tidak berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Sehingga penelitian ini sangat membantu

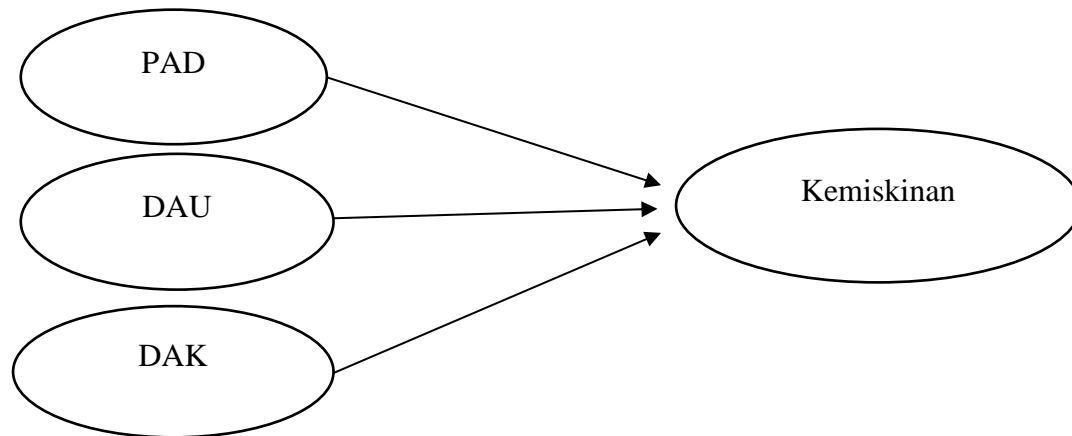
				dalam mengidentifikasi penyebab kemiskinan dalam suatu daerah.
--	--	--	--	--

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2025)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Tujuan dari kerangka konseptual dalam penelitian adalah memberikan landasan konseptual yang jelas dan terstruktur untuk mengarahkan penyelidikan. Hal ini membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian, mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, dan memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dengan kerangka konseptual yang baik, peneliti dapat mengorganisir gagasan, teori, atau model yang ada, sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan fokus. Selain itu, kerangka konseptual juga membantu dalam merumuskan hipotesis atau asumsi yang akan diuji dalam penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian



Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah. Hipotesis ini didasarkan pada temuan-temuan empiris yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga memungkinkan alokasi belanja yang lebih optimal untuk pembangunan infrastruktur dan layanan sosial. Dengan pengelolaan PAD yang efektif, pemerintah daerah dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas layanan dan program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat miskin, sehingga secara signifikan menurunkan angka kemiskinan.

H2 : Diduga bahwa peningkatan alokasi DAU berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan di NTB, artinya lebih besar DAU, maka lebih rendah persentase penduduk miskin. Bukti empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa transfer fiskal seperti DAU dapat menurunkan kemiskinan di daerah miskin Indonesia hingga 1-2% per tahun melalui peningkatan belanja sosial. Di NTB, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2015-2024 menunjukkan tren di mana peningkatan DAU sering diikuti oleh penurunan indikator kemiskinan, seperti kedalaman kemiskinan, meskipun efektivitasnya tergantung pada efisiensi alokasi belanja daerah.

H3 : Diduga DAK memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan kesempatan ekonomi yang lebih luas. Besarnya alokasi DAK daerah yang diarahkan secara tepat dan dikelola secara efisien akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam

konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat, peningkatan DAK yang difokuskan pada sektor-sektor strategis diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan selama periode 2015–2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen terhadap variabel dependen di Nusa Tenggara Barat selama periode 2015-2024. Pendekatan ini dipilih karena data penelitian bersifat numerik dan longitudinal (time series), yang memungkinkan analisis statistik inferensial untuk menguji signifikansi pengaruh transfer keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan. Data diperoleh dari sumber sekunder resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) untuk indikator kemiskinan dan Kementerian Keuangan untuk data keuangan daerah, sehingga memastikan validitas dan reliabilitas analisis.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang terdiri dari sepuluh kabupaten dan kota, dengan fokus pada analisis data regional untuk memahami dinamika kemiskinan terkait transfer keuangan daerah. Lokasi ini dipilih karena NTB merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi di Indonesia, sehingga relevan untuk menguji efektivitas variabel seperti PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah. Periode penelitian mencakup tahun 2015 hingga 2024, memungkinkan analisis longitudinal untuk mengamati tren perubahan seiring waktu. Data diperoleh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan, yang mencakup seluruh wilayah NTB untuk memastikan representativitas regional.

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup seluruh data terkait indikator kemiskinan dan variabel keuangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2015 hingga 2024. Data populasi diperoleh dari sumber sekunder resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) untuk variabel kemiskinan (Y) dan Kementerian Keuangan untuk variabel independen (X1: PAD, X2: DAU, X3: DAK). Populasi ini bersifat longitudinal dengan total unit observasi sebanyak 10 tahun, yang mencakup seluruh kabupaten dan kota di NTB, sehingga memungkinkan analisis komprehensif terhadap tren regional.

Sampel penelitian terdiri dari seluruh data populasi yang tersedia, yaitu data tahunan untuk variabel kemiskinan dan keuangan daerah di NTB dari tahun 2015 hingga 2024. Dengan ukuran sampel sebanyak 10 observasi (satu per tahun), sampel ini mencakup indikator seperti persentase penduduk miskin, nilai PAD dalam rupiah, jumlah DAU dan DAK yang diterima.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling, di mana seluruh populasi (data lengkap NTB 2015-2024) dijadikan sampel tanpa seleksi parsial. Teknik ini dipilih karena data bersifat time series dengan jumlah observasi terbatas (10 tahun), sehingga total sampling memungkinkan analisis yang akurat dan menghindari bias sampling. Pendekatan ini juga sesuai dengan sifat data sekunder yang sudah tersedia secara lengkap dari sumber resmi, memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian tanpa kehilangan informasi penting.

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder, yang bersifat numerik dan longitudinal, mencakup indikator kemiskinan (seperti persentase penduduk miskin atau jumlah orang miskin) serta variabel keuangan daerah (PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah dalam satuan rupiah atau persentase). Data ini diperoleh dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan, dengan periode pengamatan 2015-2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemilihan jenis data kuantitatif ini memungkinkan analisis statistik inferensial untuk menguji hubungan kausal antara variabel independen dan dependen, serta memastikan objektivitas dan akurasi hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah dokumentasi melalui studi kepustakaan sekunder, di mana data dikumpulkan dari dokumen resmi, laporan tahunan, dan portal data terbuka tanpa melibatkan pengumpulan lapangan langsung. Proses ini meliputi pencarian dan ekstraksi data kemiskinan dari BPS serta data keuangan daerah dari Kementerian Keuangan, dengan verifikasi validitas melalui cross-checking sumber untuk menghindari kesalahan. Teknik ini dipilih karena efisiensi waktu dan biaya, serta kesesuaian dengan sifat data time series yang sudah tersedia, sehingga mendukung analisis yang komprehensif dan etis tanpa risiko bias pengumpulan primer.

3.5 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Metode ini membantu melihat pengaruh beberapa variabel bebas (PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah) terhadap satu variabel terikat (kemiskinan). Dengan cara ini, kita bisa mengetahui seberapa besar dan arah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap kemiskinan. Data yang sudah dikumpulkan akan diproses menggunakan software statistik agar hasilnya bisa dianalisis secara tepat dan akurat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Estimasi Model Regresi Linier Berganda

1. Uji Chow

Uji Chow merupakan prosedur statistika yang krusial untuk mengidentifikasi spesifikasi model yang paling tepat antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Penentuan model yang valid ini didasarkan pada perbandingan nilai Sum Squares dari kedua model tersebut. Dalam konteks pengambilan keputusan hipotesis, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Hipotesis Nol (H_0): Jika probabilitas cross-section chi-square lebih besar dari tingkat signifikansi (α), yang umumnya ditetapkan pada $\{0,05\}$, maka Common Effect Model (CEM) dianggap sebagai model yang valid untuk digunakan.
- Hipotesis Alternatif (H_1): Apabila probabilitas cross-section chi-square menunjukkan nilai yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α), yaitu $\{0,05\}$, maka Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang secara statistik valid untuk diterapkan (Winantian et al., 2024).

Tabel 4.1 Hasil Uji Chow

	Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Model	<i>Cross-section F</i>	569.685236	(10.40)	0.0000
	<i>Cross-section Chi-Square</i>	273.118258	10	0.0000

Sumber: Data diolah dengan E-views 12 (2025)

Analisis penentuan spesifikasi model yang optimal (antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model) dilakukan melalui Uji Chow, dengan mengacu pada hasil yang disajikan dalam Tabel 4.1 menunjukkan konsistensi hasil yang serupa. Dalam kedua kasus tersebut, nilai Probabilitas Cross-section Chi-square yang diperoleh adalah $\{0,0000\}$. Karena nilai probabilitas ini secara signifikan lebih kecil daripada tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka kesimpulan statistik yang diambil adalah menolak Hipotesis Nol (H_0) dan menerima Hipotesis Alternatif (H_1). Hasil ini secara definitif mengindikasikan bahwa Fixed Effect Model (FEM) adalah model estimasi yang secara statistik lebih tepat dan valid untuk digunakan, dibandingkan dengan Common Effect Model (CEM), ini menyiratkan adanya

perbedaan karakteristik atau intersep antar-individu (perusahaan/entitas) yang signifikan yang perlu diakomodasi dalam pemodelan.

2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan instrumen ekonometrika yang esensial untuk memverifikasi spesifikasi model panel data yang paling tepat, yaitu antara Random Effect Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM). Uji ini berfungsi untuk menilai apakah terdapat korelasi sistematis antara error term dengan variabel independen, yang menjadi dasar penentuan model mana yang konsisten dan efisien. Kriteria pengambilan keputusan hipotesis dalam Uji Hausman didasarkan pada perbandingan nilai Probabilitas Cross-section random dengan tingkat signifikansi (α), yang umumnya ditetapkan sebesar $\{0,05\}$:

- Hipotesis Nol (H_0): Jika Probabilitas Cross-section random lebih besar dari 0,05, maka Random Effect Model (REM) merupakan model yang secara statistik valid dan lebih efisien.
- Hipotesis Alternatif (H_1): Jika Probabilitas Cross-section random lebih kecil dari 0,05, maka Hipotesis Nol ditolak, dan Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang valid dan konsisten untuk digunakan (Winantian et al., 2024).

Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman

	Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Model	<i>Cross-section Random</i>	64.600113	4	0.0000

Sumber: Data diolah dengan E-views 12 (2025)

Analisis penentuan model yang paling efisien dan konsisten antara Random Effect Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM) dilakukan melalui Uji Hausman, sebagaimana terangkum dalam Tabel 4.2 Hasil pengujian menunjukkan pola keputusan yang seragam untuk model. Hal ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang lebih tepat untuk digunakan dibandingkan dengan Random Effect Model (REM). Hasil Uji Hausman memberikan nilai probabilitas yang lebih ekstrem, yaitu 0,0000. Konsisten dengan kriteria sebelumnya, nilai ini jelas lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$), sehingga H_0 kembali ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, Fixed Effect Model (FEM) ditetapkan sebagai model estimasi yang lebih superior.

3. Hasil Regresi Terbaik

Berdasarkan serangkaian prosedur pemilihan model, yang meliputi Uji Chow dan Uji Hausman, disimpulkan secara konsisten bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan

model estimasi yang paling tepat dan superior untuk diaplikasikan dalam penelitian regresi data panel ini, baik pada Model 1 maupun Model 2.

Dengan terpilihnya Fixed Effect Model (FEM) sebagai spesifikasi model terbaik, pengujian asumsi klasik yang relevan perlu dilanjutkan. Dalam konteks estimasi FEM, fokus utama pengujian asumsi klasik diarahkan pada Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas (Candra, 2024). Pengujian ini krusial untuk memastikan bahwa estimator FEM yang dihasilkan bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) dan inferensi statistika yang ditarik adalah valid. Berikut adalah hasil regresi data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM):

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Regresi Terbaik Fixed Effect Model (FEM)

Effects Specification				
Cross-section Fixed (Dummy Variables)				
<i>R-Squared</i>	0.997619	<i>Mean Dependent Var</i>	9.269818	
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.996864	<i>S.D. Dependent Var</i>	0.906298	
<i>S.E. of Regression</i>	0.050755	<i>Akaike Info Criterion</i>	-2.908296	
<i>Sum Squared Resid</i>	0.105618	<i>Schwarz Criterion</i>	-2.397339	
<i>Log Likelihood</i>	93.97815	<i>Hannan-Quin-Criter.</i>	-2.710705	
<i>F-Statistic</i>	1321.310	<i>Durbin-Watson Stat</i>	1.928976	
<i>Prob (F-Statistic)</i>	0.000000			
Model 2 (Y)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.952677	0.907897	2.150769	0.0376
X1	0.001377	0.035539	0.038739	0.9693
X2	0.048817	0.089401	0.546046	0.5881
X3	0.014252	0.012191	1.169043	0.2493
Effects Specification				
Cross-section Fixed (Dummy Variables)				
<i>R-Squared</i>	0.999303	<i>Mean Dependent Var</i>	4.272727	
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.999060	<i>S.D. Dependent Var</i>	1.035296	
<i>S.E. of Regression</i>	0.031749	<i>Akaike Info Criterion</i>	-3.834890	
<i>Sum Squared Resid</i>	0.040321	<i>Schwarz Criterion</i>	-3.287435	
<i>Log Likelihood</i>	120.4595	<i>Hannan-Quin-Criter.</i>	-3.623185	
<i>F-Statistic</i>	4098.487	<i>Durbin-Watson Stat</i>	1.529326	
<i>Prob (F-Statistic)</i>	0.000000			

Sumber: Data diolah dengan E-views 12 (2025)

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan uji asumsi klasik yang esensial dalam analisis regresi untuk mendeteksi adanya korelasi linear yang kuat di antara variabel-variabel independen (variabel bebas) dalam model (Suot & Koleangan, 2020). Uji ini penting karena

multikolinearitas dapat menyebabkan estimasi koefisien menjadi tidak stabil dan varians menjadi besar, meskipun model secara keseluruhan signifikan. Merujuk pada pedoman Ghazali (2017:73) yang diadopsi oleh Septanta (2023), kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan gejala ini didasarkan pada nilai koefisien korelasi antarvariabel bebas. Secara spesifik, model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai koefisien korelasi antarvariabel independen kurang dari 0,90 < 90%. Sebaliknya, jika koefisien korelasi menunjukkan nilai melebihi 0,90 > 90%, maka model teridentifikasi memiliki masalah multikolinearitas. Oleh karena itu, syarat mutlak bagi model yang baik dan terbebas dari multikolinearitas adalah koefisien korelasi antar variabel penjelas harus berada di bawah ambang batas 0,90.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.746132	0.694722
X2	0.746132	1.000000	0.841608
X3	0.694722	0.841608	1.000000

Sumber: Data diolah dengan E-views 12 (2025)

Berdasarkan Tabel 4.4 mengenai Hasil Uji Multikolinearitas, koefisien korelasi yang terobservasi antara variabel-variabel independen adalah sebagai berikut: X1 dan X2 (0,746132), X1 dan X3 (0,694722), serta X2 dan X3 (0,841608). Karena semua nilai korelasi tersebut berada di bawah ambang batas 0,90, maka dapat dipastikan bahwa asumsi non-multikolinearitas telah terpenuhi.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari Uji Heteroskedastisitas adalah mengevaluasi apakah varian residual (sisaan) dalam suatu persamaan regresi memiliki variasi yang tidak sama antar pengamatan. Keadaan varian yang tetap disebut Homoskedastisitas, dan inilah kondisi yang diharapkan untuk model regresi yang baik. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, dapat digunakan Uji Gletser. Berdasarkan Jolianis (2016), tidak terdapat gejala heteroskedastisitas apabila nilai Probabilitasnya berada di atas level signifikansi (Alpha) 0,05.

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.225298	0.361107	-0.623909	0.5362
X1	0.001771	0.014135	0.125304	0.9009
X2	0.024993	0.035558	0.702878	0.4862
X3	0.001771	0.004849	0.365187	0.7169

Sumber: Data diolah dengan E-views 12 (2025)

Hasil Uji Heteroskedastisitas pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki Nilai Probabilitas yang lebih besar dari 0,05 Prob. $X_1=0,9009$, Prob. $X_2=0,4862$, Prob. $X_3=0,7169$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala Heteroskedastisitas dalam model regresi.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) berfungsi mengukur proporsi variasi pada variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model regresi. Nilai R² berada di rentang 0 hingga 1. Semakin nilai R² mendekati 1, semakin besar dan semakin baik kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan (memprediksi) variabel terikat. Sebaliknya, nilai R² yang mendekati 0 mengindikasikan bahwa variabel bebas hanya memberikan sedikit pengaruh, yang berarti hubungan antar variabel dalam model regresi relatif lemah.

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien determinan (R²)

<i>R-Squared</i>	0.999303
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.999060

Sumber: Data diolah dengan E-views 12 (2025)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa Model Efek Tetap (FEM) memiliki nilai R-Squared sebesar 0,999303. Angka ini mengindikasikan bahwa 99,93% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan secara efektif oleh variabel independen yang digunakan dalam model. Sisanya, 0,07%, merupakan variasi yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar lingkup penelitian ini.

Uji T

Uji t (Uji Parsial) digunakan untuk menentukan pengaruh individual masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah: H_0 : Variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. H_1 : Variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian ini dapat dilakukan melalui dua cara penentuan: Perbandingan Nilai t: Jika nilai t-hitung > t-tabel, maka H_0 ditolak, yang berarti variabel bebas berpengaruh signifikan. Perbandingan Nilai Probabilitas (Signifikansi): Jika nilai Probabilitas $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak, yang juga menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan (Winantian et al., 2024).

Tabel 4.7 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.952677	0.907897	2.150769	0.0376

X1	0.001377	0.035539	0.038739	0.9693
X2	0.048817	0.089401	0.546046	0.5881
X3	0.014252	0.012191	1.169043	0.2493

Sumber: Data diolah dengan E-views 12 (2025)

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 4.7, diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,9693, yang nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. variabel Dana Alokasi Umum (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5881, yang nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan pada variabel X2 belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah. Variabel X3 juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan, dengan nilai probabilitas sebesar 0,2493, yang masih lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Maka dapat dijelaskan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kondisi ini mencerminkan bahwa variabel X3 belum menjadi faktor dominan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan.

Uji F

Uji F (Uji Simultan) digunakan untuk mengevaluasi pengaruh keseluruhan (bersama-sama) dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang diuji adalah: H0: Variabel independen secara kolektif tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. H1: Variabel independen secara kolektif berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini, digunakan dua kriteria (Winantian et al., 2024): Perbandingan Nilai F: H0 ditolak jika nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, yang berarti terdapat pengaruh simultan yang signifikan. Perbandingan Nilai Probabilitas (Signifikansi): H0 ditolak jika nilai Probabilitas \leq 0,05, yang juga mengindikasikan adanya pengaruh simultan yang signifikan.

Tabel 4.8 Uji F

<i>F-Statistic</i>	1321.310
<i>Prob (F-Statistic)</i>	0.000000

Sumber: Data diolah dengan E-views 12 (2025)

Berdasarkan Tabel 4.8, Hasil Uji F untuk Model 1 menunjukkan nilai F-Statistik sebesar 1321,310 dengan Nilai Probabilitas 0,000000. Karena Nilai Probabilitas tersebut jauh

lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, variabel PAD, DAU, dan DAK secara serentak (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB pada periode 2019–2023.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai pembangunan, termasuk program-program pengentasan kemiskinan. Secara teoritis, peningkatan PAD memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta pelaksanaan program sosial dan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh karena itu, PAD sering dipandang sebagai instrumen penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah.

Hasil pengujian empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas (prob.) sebesar 0,9693, yang nilainya jauh lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, secara parsial PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan PAD, baik peningkatan maupun penurunan, belum mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat miskin di NTB.

Tidak signifikannya pengaruh PAD terhadap kemiskinan dapat dijelaskan oleh kondisi struktural pengelolaan keuangan daerah di Provinsi NTB. PAD di sebagian besar kabupaten/kota masih relatif rendah dan bersumber dari sektor-sektor yang tidak secara langsung mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Selain itu, alokasi PAD cenderung lebih banyak diarahkan pada belanja rutin dan operasional pemerintahan dibandingkan dengan belanja yang bersifat produktif dan pro-poor, seperti program pemberdayaan usaha mikro, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Selain faktor alokasi anggaran, perbedaan kapasitas fiskal antar kabupaten/kota di Provinsi NTB juga menjadi salah satu penyebab PAD belum efektif dalam menurunkan kemiskinan. Daerah dengan PAD relatif tinggi belum tentu memiliki kebijakan distribusi anggaran yang tepat sasaran, sementara daerah dengan PAD rendah menghadapi keterbatasan

fiskal dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Kondisi ini menyebabkan PAD belum mampu berperan sebagai instrumen kebijakan yang efektif dalam menekan tingkat kemiskinan secara merata di seluruh wilayah NTB.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sejalan dengan temuan beberapa penelitian terdahulu. Pratowo dan Daerobi (2015) menyatakan bahwa peningkatan PAD belum tentu berdampak langsung pada penurunan kemiskinan apabila alokasi anggaran daerah lebih banyak difokuskan pada belanja rutin dan administrasi pemerintahan. Kondisi tersebut menyebabkan PAD belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk program-program yang bersifat pro-poor dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Temuan serupa juga dikemukakan oleh Sari dan Suparta (2019) yang menyimpulkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan karena keterbatasan kapasitas fiskal daerah serta lemahnya efektivitas pengelolaan anggaran. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa besarnya PAD tidak secara otomatis mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Melalui DAU, pemerintah pusat diharapkan dapat membantu pemerintah kabupaten/kota dalam membiayai kebutuhan dasar pelayanan publik dan pembangunan daerah, termasuk program-program yang berorientasi pada pengurangan tingkat kemiskinan. Secara konseptual, semakin besar DAU yang diterima suatu daerah, maka semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.

Hasil pengujian empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas (prob.) sebesar 0,5881, yang nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, secara parsial DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya DAU yang diterima pemerintah daerah belum mampu secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah penelitian.

Tidak signifikannya pengaruh DAU terhadap kemiskinan dapat disebabkan oleh pola pemanfaatan DAU yang cenderung difokuskan pada belanja rutin dan belanja pegawai, dibandingkan dengan belanja pembangunan yang bersifat produktif dan pro-rakyat. Kondisi ini menyebabkan DAU lebih berperan dalam menjaga stabilitas operasional pemerintahan daerah daripada sebagai instrumen efektif dalam mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Selain itu, ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB terhadap DAU juga berpotensi mengurangi insentif daerah untuk mengoptimalkan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis potensi lokal. Daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat cenderung memiliki fleksibilitas fiskal yang terbatas dalam merancang program inovatif yang menysar kelompok miskin secara langsung. Akibatnya, meskipun DAU terus meningkat, dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan masih relatif kecil.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa DAU cenderung digunakan untuk membiayai belanja rutin dan belanja pegawai. Hidayat dan Widodo (2018) menemukan bahwa meskipun DAU merupakan transfer fiskal terbesar dari pemerintah pusat, pemanfaatannya belum mampu memberikan dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan di daerah.

Temuan penelitian oleh Nurkholis (2020) menyatakan bahwa karakteristik DAU sebagai dana yang bersifat umum (block grant) memberikan fleksibilitas tinggi bagi daerah, namun fleksibilitas tersebut sering kali tidak diiringi dengan kebijakan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Hal ini mendukung hasil penelitian ini bahwa DAU belum menjadi instrumen yang efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional, terutama dalam penyediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor strategis lainnya. Secara konseptual, DAK diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal seperti kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hasil pengujian empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi NTB. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas (prob.) sebesar 0,2493, yang nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, secara parsial DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi DAK belum mampu secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah penelitian.

Tidak signifikannya pengaruh DAK terhadap kemiskinan dapat disebabkan oleh karakteristik DAK yang bersifat spesifik dan terikat (earmarked), sehingga penggunaannya terbatas pada kegiatan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun kegiatan tersebut penting bagi pembangunan jangka panjang, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan sering kali bersifat tidak langsung dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk dapat dirasakan oleh masyarakat miskin.

Selain itu, efektivitas DAK juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kapasitas teknis, keterlambatan realisasi anggaran, serta kurangnya integrasi program DAK dengan kebutuhan riil masyarakat miskin di daerah dapat mengurangi efektivitas DAK dalam menurunkan kemiskinan. Akibatnya, meskipun DAK dialokasikan dalam jumlah yang cukup besar, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi NTB belum terlihat secara signifikan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kuncoro (2017) menjelaskan bahwa DAK memiliki sifat spesifik dan terikat pada program-program tertentu, sehingga dampaknya terhadap kemiskinan bersifat tidak langsung dan membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penelitian lain oleh Putri dan Handayani (2021) juga menemukan bahwa efektivitas DAK dalam menurunkan kemiskinan sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat daerah. Keterlambatan realisasi anggaran serta kurangnya kesesuaian program DAK dengan kebutuhan masyarakat miskin menjadi faktor utama yang menyebabkan DAK belum memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa DAK belum mampu berperan optimal sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, variabel desentralisasi fiskal yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 2019–2023. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F-statistik yang tinggi dengan probabilitas sebesar 0,000000, yang mengindikasikan bahwa model penelitian secara keseluruhan layak digunakan dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di wilayah penelitian. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa masing-masing variabel PAD, DAU, dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini tercermin dari nilai probabilitas PAD sebesar 0,9693, DAU sebesar 0,5881, dan DAK sebesar 0,2493, yang seluruhnya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa secara individual, instrumen desentralisasi fiskal tersebut belum mampu memberikan dampak langsung dan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi NTB. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum berjalan secara optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan dan pengalokasian PAD, DAU, dan DAK agar lebih tepat sasaran dan berorientasi langsung pada pengurangan kemiskinan, khususnya melalui program-program yang menyentuh kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengarahkan alokasi anggaran pada program-program yang secara langsung berorientasi pada pengurangan kemiskinan. Optimalisasi PAD tidak hanya difokuskan pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada kualitas belanja yang lebih tepat sasaran. Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola secara lebih efisien dengan mengurangi dominasi belanja rutin dan meningkatkan porsi belanja yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Sementara itu, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu diselaraskan dengan prioritas pengentasan kemiskinan daerah melalui perencanaan dan pengawasan yang lebih optimal. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memasukkan

variabel lain di luar desentralisasi fiskal serta menggunakan periode dan metode analisis yang lebih beragam guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M., Suharianto, J., Anggriani, D., & Sianturi, Y. M. (2025). Pengaruh DAK dan TPT Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan IPM di Sumatera Utara 2009-2024. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3), 151-162.
- Adenada, t. F. (2024). *Dampak Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Lapangan Minyak Banyu Urip Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Afni Wahyuni, N. (2024). *ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020-2022* (Doctoral dissertation, STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG).
- Agastha, M. E., & Rahman, Y. A. (2025). PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI PULAU JAWA TAHUN 2017–2024. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(8), 2297-2314.
- Akib, F. H. Y., Novriansyah, M. A., & Wolok, E. (2025). DINAMIKA KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO: TREN, TANTANGAN, DAN STRATEGI PENANGGULANGAN 2012–2022. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(3), 1203-1215.
- Alim, S., & Harsono, I. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 370-377.
- Andina, W., & Wahyudi, A. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(01), 69-80.
- Andini, A. S., & Pribadi, Y. (2022). Efisiensi Penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk Pendidikan Menengah di Kabupaten Wonosobo: Pendekatan Data Envelopment Analysis. *Jurnal Inovasi Pembangunan-Kelitbangan*, 10(2), 177-192.
- Ariesti, A. E., & Asmara, K. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulau Jawa. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 432-438.
- Aryansah, J. E., Budiyanto, M. N., & Ismail, R. G. (2024). OPTIMALISASI PAJAK DAERAH UNTUK FASILITAS PUBLIK STUDI EFISIENSI ALOKASI DAN DAMPAK PEMBANGUNAN SOSIAL. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 2292-2302.
- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan Pdrb Daerah Tertinggal. *Jurnalku*, 3(4), 445-469.

- Bado, B., Sitti Hasbiah, S. H., Hasan, M., & Alam, S. (2017). Model kebijakan belanja pemerintah sektor pendidikan dalam perspektif pembangunan ekonomi.
- Bandiyono, A. (2018). Pengaruh belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi terhadap peningkatan IPM dan pengentasan kemiskinan (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Info Artha*, 2(1), 11-28.
- Budiman, B., Jumaedi, M., Withri, D. A., Gafur, A., Wafik, A. Z., & Adha, R. (2024). Co-design Program Pemberdayaan Pemuda Pesisir di Desa Meninting, Kabupaten Lombok Barat. *Sciences du Nord Community Service*, 1(02), 31-38.
- Christia, A. M. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*.
- Diyanayati, K., & Padmiati, E. (2017). Faktor Determinan Penyebab Kemiskinan Di Sulawesi Selatan. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(2), 199-214.
- Durojatun, I. (2015). *Dampak Sosial Ekonomi Perubahan Tata Kelola Sumur Tua Dan Strategi Adaptasi Penambang Tradisional Di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Faizah, U. N., & Woyanti, N. (2023). Analisis Pengaruh Pendidikan, Partisipasi Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun 2011-2020. *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 6(1), 48-61.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 14(1), 44-52.
- Filiasari, A., & Setiawan, A. H. (2021). Pengaruh Angkatan Kerja, Upah, PDRB, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2002-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(2).
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79-90.
- Hadi, F., Fatmayanti, F., Hidayat, M. R., & Rusdi, R. (2024). Analisis Multidimensi Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Aceh: Pendekatan Ekonometrika dan Indeks IPM dengan Data Mikro Ekonomi. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 8(2).
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan fiskal di Indonesia: Analisis hukum keadilan ekonomi dan implikasi bagi pembangunan berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146-167.
- Halawa, L. L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia Dalam

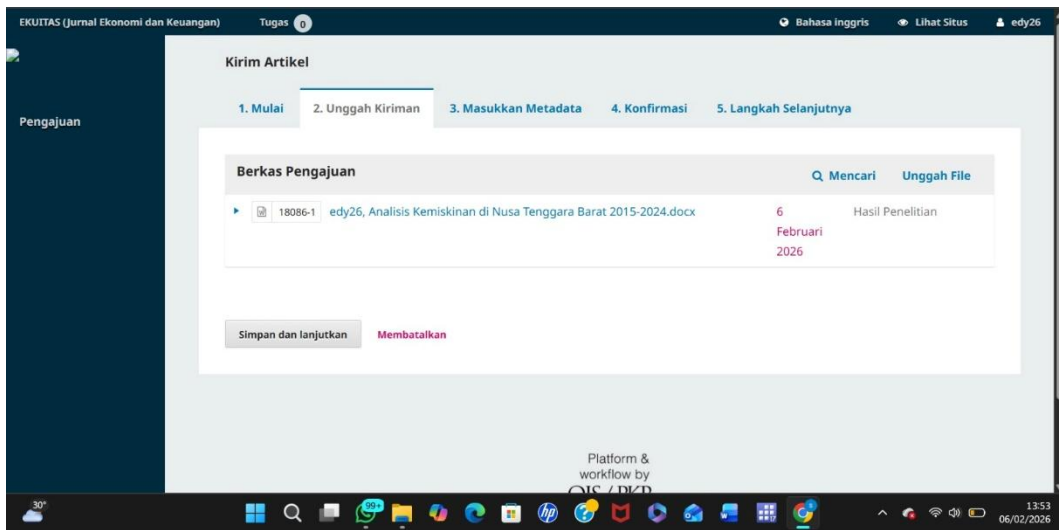
- Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Terkait Keuangan Negara. *Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi*, 2(1), 43-53.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 593-600.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Danaperimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 593-600.
- Hindayani, F., Novita, Y., & Hurriati, L. (2024). ANALISIS FAKTOR PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT. *JOURNAL OF ECONOMIC, BUSINESS AND TOURISM*, 1(2), 30-40.
- Hindayani, F., Novita, Y., & Hurriati, L. (2024). ANALISIS FAKTOR PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT. *JOURNAL OF ECONOMIC, BUSINESS AND TOURISM*, 1(2), 30-40.
- Hindayani, F., Novita, Y., & Hurriati, L. (2024). ANALISIS FAKTOR PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT. *JOURNAL OF ECONOMIC, BUSINESS AND TOURISM*, 1(2), 30-40.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 189-201.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 189-201.
- Ibrahim, I. (2025). Dinamika Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 11(1), 100-121.
- Imsar, I., & Zaman, M. Q. (2024). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 14(2), 42-48.
- Kamala, J. I., Salsa, S. A., & Pangestoeti, W. (2025). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(7), 120-128.
- Karlinda, E., Rheza, B., Damanik, M. I., Agustine, T. E., & Sianturi, M. N. (2015). *Optimalisasi Fiskal bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Peran Belanja Operasional dan Belanja Modal dalam APBD*. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

- Kusuma, A. A. N. J., & Indrajaya, I. G. B. (2020). Analisis pengaruh inklusi keuangan terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di kabupaten/kota provinsi bali. *E-Jurnal EP Unud*, 9(5), 993-1022.
- Lalenda, R. P., & Santoso, E. B. (2025). *DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN NIKEL TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN MOROWALI UTARA (KASUS PADA PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY)* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Listyani, S., & Hariyanto, B. (2018). Dampak Industri Pertambangan Minyak Bumi Terhadap Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. *Swara Bhumi*, 6, 78-84.
- Malau, P. L., Manik, D. V., Tobing, W. S. L., & Pulungan, W. R. (2023). Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) di Provinsi Sumatra Utara. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(3), 421-431.
- Manek, M., & Badrudin, R. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah bisnis*, 17(2).
- Manek, M., & Badrudin, R. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah bisnis*, 17(2).
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390-399.
- Mulia, R. A., & Putri, R. P. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 22-33.
- Mulyadi, M. (2017). Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat. *Kajian*, 21(3), 221-236.
- Murti, S., & Trisnawati, R. (2021). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pad Yang Sah, Dan Dak Pada Belanja Modal. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 105-119.
- Nurdin, H., & Dini, S. K. (2024). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di NTB Dengan Menggunakan Distributed Lag Model–Model Koyck: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di NTB Dengan Menggunakan Distributed Lag Model–Model Koyck. *Emerging Statistics and Data Science Journal*, 2(1), 153-165.

- Octaviani, I., & Supriadi, S. (2024). Analisis Dampak Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ai Mual. *Journal of Social and Education*, 1(1), 6-14.
- Panggabean, J. S. E. A., Mahendra, A., & Setyaningsih, K. J. (2025). Peran Kapasitas Fiskal, Dependensi Fiskal pada Pemerintah Pusat, dan Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat: Studi Lintas Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan. *EQUILIBRIUM-Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(2), 279-290.
- Permana, A., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Pemerintah Daerah dalam Dinamika Perekonomian Masyarakat: Perspektif Hukum dan Sosiologi: Local Government in The Dynamics of The Community Economy: A Legal and Sociological Perspective. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 001-028.
- Pratama, I. P. Y. W., Fadliyanti, L., & Wafik, A. Z. (2025). Pengaruh Kemiskinan, PDRB, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 148-168.
- Primadianti, N., & Sugiyanto, C. (2020). Ketimpangan Regional, Pertumbuhan Ekonomi Pro Poor, dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1-20.
- Primadianti, N., & Sugiyanto, C. (2020). Ketimpangan Regional, Pertumbuhan Ekonomi Pro Poor, dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1-20.
- Putri, C., & Yefriza, Y. (2025). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 266-275.
- Rahmadana, F. D., & Priyana, Y. (2022). *Pengaruh keberadaan pertambangan minyak tradisional terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rahman, Z., & Sumarni, S. (2024). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 1183-1193.
- Rais, L., Halik, W., Taopan, A., Rumodar, M., Yanyaan, R. R., & Saiba, R. L. (2025). Keadilan Sosial dalam Pembangunan: Tinjauan Literatur Terhadap Kebijakan Pembangunan dengan Adanya Efisiensi Anggaran dari Pusat. *Papua Journal of Sociology (PJS)*, 3(1), 38-55.
- Ramadhan, B. A., & Setyowati, E. (2023). Analisis Pengaruh Populasi Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi

- Angkatan Kerja Provinsi Banten Tahun 2017-2021. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 82-89.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81-87.
- Risdiyanto, E., Mollet, J. A., & Hutajulu, H. (2023). Analisis kemandirian fiskal dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Papua. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 1813-1822.
- Riyanto, W. H. (2025). *Model Kelembagaan Daerah dalam Penanganan Kemiskinan*. UMMPress.
- Saputra, A. F., Fitri, R. N., & Malik, A. (2024). DEMOGRAFI ANGKATAN KERJA DI INDONESIA: TREN, TANTANGAN, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 8963-8971.
- Sianipar, M., Widiana, I. N. W., Latuheru, A., Irawati, D. O., Mardika, N. H., Andra, R. S., ... & Widuri, N. (2025). *Fundamental Ekonomi Pembangunan*. CV. Gita Lentera.
- Siddiqoh, E. A. A. (2015). Konflik Masyarakat Penambang Minyak Mentah (Analisis Konflik Pengelolaan Pertambangan Minyak Mentah Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode 2009-2015) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Simanjuntak, G. Y., Yulika, M., Putri, D. N., & Pangestoeti, W. (2025). PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(6), 260-273.
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 40-48.
- Siti Rodiah, V. (2019). *Pengaruh Pdrb, Upah Minimum, Angka Melek Huruf Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Periode 2010-2015* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA).
- Suhardi, S., & Panjaitan, P. (2025). Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 42-55.
- Suryani, S. P. (2024). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN TRANSFER KE DAERAH SEBAGAI MODERASI PADA PEMERINTAH DAERAH DI ACEH* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

- Talangamin, O. B., Kindangen, P., & Koleangan, R. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7).
- Triyulianto, T., & Nurvita, B. S. R. (2024). Pengaruh Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Good Governance*, 20(2).
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21-37.
- Wardini, P. M. (2024). *ANALISIS FAKTOR EKONOMI DAN FISKAL TERHADAP KEMISKINAN 16 PROVINSI DENGAN KEMISKINAN TERTINGGI DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA).
- Yaqin, U. A., & Herwanti, T. (2018). Analisis permasalahan pengelolaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada pemerintah daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 123-136.
- Yaqin, U. A., & Herwanti, T. (2018). Analisis permasalahan pengelolaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada pemerintah daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 123-136.
- Yasin, R. (2021). *Kebijakan program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas* (Master's thesis, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)).



<https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas>



<https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/951>